

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Kondisi Geografis



Sumber : BPS Provinsi Lampung Dalam Angka, 2016

Gambar 4.1

Peta Wilayah Provinsi Lampung

Gambar 4.1 di atas merupakan gambaran peta Provinsi Lampung yang meliputi areal dataran seluas 35.288,35 Km² termasuk pulau-pulau yang terletak pada bagian sebelah paling ujung tenggara pulau sumatra.

Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan 103°40'' (BT) Bujur Timur sampai 105°50'' (BT) Bujur Timur dan 3°45'' (LS) Lintang Selatan sampai 6°45'' (LS) Lintang Selatan. Provinsi Lampung meliputi areal

daratan seluas 35.288,35 km (Lampung dalam angka, BPS 2012) termasuk 132 pulau di sekitarnya dan lautan yang berbatasan dalam jarak 12 mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas. Luas perairan laut Provinsi Lampung diperkirakan lebih kurang 24.820 km (atlas sumberdaya pesisir Lampung, 1999). Panjang garis pantai Provinsi Lampung lebih kurang 1.105 km, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km). Berbatasan langsung dengan sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, sebelah Selatan dengan selat Sunda, sebelah Timur dengan laut Jawa, sebelah Barat dengan Samudera Indonesia.

Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung, yang merupakan gabungan dari Kota Kembar Tanjungkarang dan Telukbetung memiliki wilayah yang relative luas dan menyimpan potensi kelautan. Pelabuhan utamanya bernama Panjang dan Bakauheni serta Pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan (telukbetung), Tarahan dan Kalianda di Teluk Lampung. Sedangkan di Teluk Semangka adalah Kota Agung dan laut Jawa terdapat pula Pelabuhan nelayan seperti Labuhan Maringgai dan Ketapang. Disamping itu Kota Menggala juga dapat dikunjungi kapal-kapal nelayan dengan menyusuri sungai Way Tulang Bawang, adapun Samudra Indonesia terdapat Pelabuhan Krui. Lapangan terbang utamanya adalah Radin Inten II yaitu nama baru dari Branti 28 Km dari ibukota melalui jalan Negara menuju Kotabumi dan Lapangan terbang AURI terdapat di Menggala yang bernama Astra Ksetra (BPS Lampung).

Secara administratif, Provinsi Lampung terdiri dari 13 pemerintah kabupaten dan 2 pemerintah kota. Pemerintah Kabupaten dan kota membawahi pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Kementrian Dalam Negri Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1) Kabupaten Lampung Barat | : Ibukota Liwa |
| 2) Kabupaten Tanggamus | : Ibukota Kota Agung |
| 3) Kabupaten Lampung Selatan | : Ibukota Kalianda |
| 4) Kabupaten Lampung Timur | : Ibukota Sukadana |
| 5) Kabupaten Lampung Tengah | : Ibukota Gunung Sugih |
| 6) Kabupaten Lampung Utara | : Ibukota Kotabumi |
| 7) Kabupaten Way Kanan | : Ibukota Blambangan Umpu |
| 8) Kabupaten Tulang Bawang | : Ibukota Menggala |
| 9) Kabupaten Pesawaran | : Ibukota Gedong Tataan |
| 10) Kabupaten Pringsewu | : Ibukota Pringsewu |
| 11) Kabupaten Mesuji | : Ibukota Mesuji |
| 12) Kabupaten Tulang Bawang Barat | : Ibukota Panaragan Jaya |
| 13) Kabupaten Pesisir Barat | : Ibukota Krui |
| 14) Kota Bandar Lampung | : Ibukota Bandar Lampung |
| 15) Kota Metro | : Ibukota Metro |

Tabel 4.1
Pembagian wilayah administrasi Provinsi Lampung tahun 2016

NO	KABUPATEN/KOTA	2016		
		Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Lampung Barat	2.142,78	15	136
2	Tanggamus	3.020,64	20	302
3	Lampung Selatan	700,32	17	260
4	Lampung Timur	5.325,03	24	264
5	Lampung Tengah	3.802,68	28	314
6	Lampung Utara	2.725,87	23	247
7	Way Kanan	3.921,63	14	227
8	Tulang Bawang	3.466,32	15	151
9	Pesawaran	2.243,51	11	144
10	Pringsewu	625	9	131
11	Mesuji	2.184	7	105
12	Tulang Bawang Barat	1.201	8	96
13	Pesisir Barat	2.907,23	11	118
14	Kota Bandar Lampung	296	20	126
15	Kota Metro	61,79	5	22
PROVINSI LAMPUNG		35.288,35	228	2643

Sumber : BPS, Provinsi Lampung dalam Angka 2016

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, jumlah kecamatan dan jumlah desa/kelurahan terbanyak terdapat di Kabupaten Lampung Tengah yakni 28 kecamatan dan 314 desa/kelurahan pada tahun 2016.

B. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia (IPM) / *human development index* (HDI) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur perkembangan pembangunan manusia yang diukur berdasarkan aspek kesehatan, pendidikan

dan kemampuan secara ekonomi. Berdasarkan data BPS Provinsi Lampung, IPM kabupaten/kota di Provinsi Lampung terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2
IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2010-2016

Provinsi	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lampung Barat	60.93	61.92	62.51	63.21	63.54	64.37	65.45
Tanggamus	60.09	60.63	61.14	61.89	62.67	63.66	64.41
Lampung Selatan	61.07	61.95	62.68	63.35	63.75	65.22	66.19
Lampung Timur	63.23	64.10	65.10	66.07	66.42	67.10	67.88
Lampung Tengah	64.14	64.71	65.60	66.57	67.07	67.61	68.33
Lampung Utara	61.82	62.67	62.93	64.00	64.89	65.20	65.95
Way Kanan	61.27	62.04	62.79	63.92	64.32	65.18	65.74
Tulang Bawang	63.21	63.67	64.11	64.91	65.83	66.08	66.74
Pesawaran	58.64	59.44	59.98	60.94	61.70	62.70	63.47
Pringsewu	63.78	64.86	65.37	66.14	66.58	67.55	68.26
Mesuji	56.83	57.32	57.67	58.16	58.71	59.79	60.72
Tulang Bawang Barat	59.89	60.13	60.77	61.46	62.46	63.01	63.77
Kota Bandar Lampung	71.11	72.04	72.88	73.93	74.34	74.81	75.34
Kota Metro	71.37	72.23	72.86	74.27	74.98	75.10	75.45

Sumber : BPS Lampung 2016

Tabel 4.2 di atas, menunjukkan IPM di setiap wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. IPM tertinggi pada tahun 2015 adalah Kota Bandar Lampung dengan indeks 74,81 kemudian pada tahun 2016, IPM tertinggi di Provinsi Lampung adalah kota Metro yaitu dengan indeks 75,45 dan termasuk dalam kategori tinggi. Sedangkan tingkat IPM terendah adalah kabupaten Mesuji dengan indeks 60,72 terlihat bagaimana berfasiatifnya kenaikan tingkat IPM di kabupaten/kota di provinsi Lampung. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangan manusia, dengan

tersedianya sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas akan dapat mendorong kemajuan perekonomian di provinsi Lampung.

C. Upah Minimum Kabupaten/Kota

Upah minimum kabupaten/kota merupakan upah minimum yang setiap tahun berubah berdasarkan peraturan gubernur pada tiap Provinsi. Penetapan upah minimum kabupaten/kota merupakan upaya pemerintah dalam hal ini Gubernur untuk menetapkan formula upah yang realistis, sesuai dengan kondisi daerah dan kemampuan perusahaan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Bupati/Walikota, Dewan Penguapahan Provinsi serta pertumbuhan dan perkiraan inflasi pada tiap tahun disetiap kabupaten/kota. Penetapan upah minimum di setiap kabupaten/kota merupakan upaya pemerintah untuk meningkat kesejahteraan masyarakat khususnya pekerja agar mendorong peningkatan produktifitas. Berdasarkan peraturan Gubernur Lampung setiap tahun didapatkan upah minimum kabupaten/kota di wilayah Provinsi Lampung yang terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3
Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
Tahun 2010-2016 (Rupiah)

Provinsi	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lampung Barat	767.500	855.000	975.000	1.150.000	1.225.350	1.590.000	1.763.000
Tanggamus	767.500	855.000	975.000	1.150.000	1.399.037	1.581.000	1.763.000
Lampung Selatan	767.500	855.000	975.000	1.150.000	1.402.500	1.595.000	1.800.500
Lampung Timur	767.500	855.000	975.000	1.150.000	1.225.350	1.581.000	1.763.000
Lampung Tengah	776.500	863.500	982.000	1.154.000	1.400.000	1.588.000	1.770.000
Lampung Utara	767.500	855.000	975.000	1.150.000	1.225.350	1.581.000	1.763.000
Way Kanan	776.500	866.000	983.500	1.160.000	1.408.000	1.558.500	1.763.000
Tulang Bawang	767.500	855.000	983.500	1.155.000	1.401.000	1.585.000	1.771.000
Pesawaran	767.500	855.000	975.000	1.150.000	1.225.350	1.581.000	1.763.000
Pringsewu	767.000	855.000	975.000	1.150.000	1.225.400	1.581.000	1.763.000
Mesuji	765.500	855.000	975.000	1.150.000	1.422.500	1.581.000	1.763.000
Tulang Bawang Barat	767.500	855.000	975.000	1.150.000	1.408.000	1.581.000	1.792.000
Kota Bandar Lampung	767.500	865.000	981.000	1.165.000	1.422.500	1.649.500	1.870.000
Kota Metro	767.500	855.000	975.000	1.150.000	1.400.500	1.582.000	1.764.000

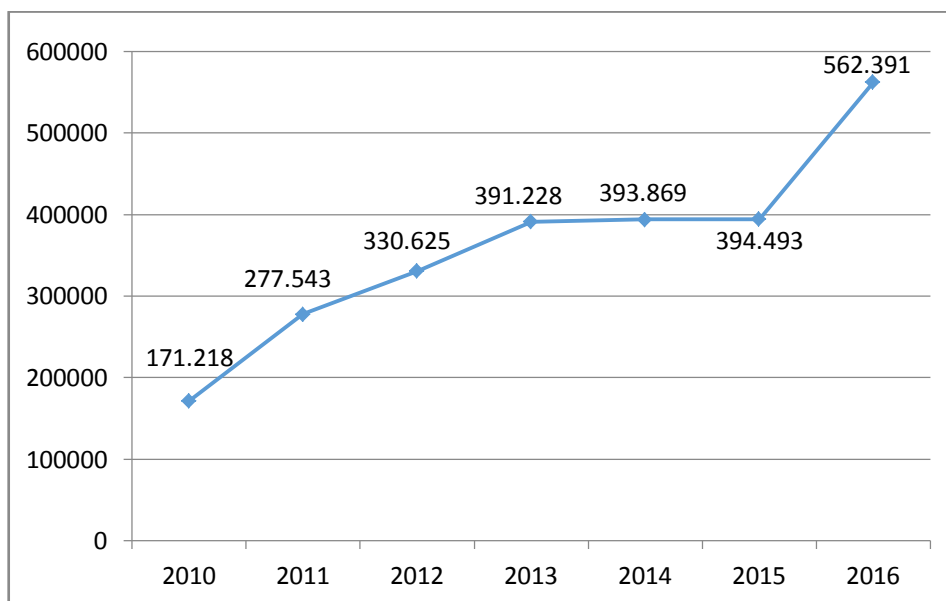
Sumber : PERGUB Lampung, 2015

Dari tabel 4.3 diatas terlihat bahwa tingkat upah minimum di kabupaten kota Provinsi Lampung relatif sama yakni dikisaran Rp.1.763.000,00. Terlihat bahwa Kota Bandar Lampung merupakan daerah dengan tingkat upah minimum tertinggi diantara kabupaten/kota di Provinsi Lampung di tiap tahunnya yakni sebesar Rp. 1.870.000,00. Meski tingkat upah minimum di tiap tahunnya mengalami peningkatan, namun tingkat upah minimum kabupaten/kota di wilayah Provinsi Lampung masih tergolong rendah di banding Provinsi lainnya di Indonesia khususnya di pulau Sumatra. Dengan rendahnya tingkat upah minimum di Provinsi Lampung akan membuat daya beli masyarakatnya juga rendah, sehingga dapat berdampak juga bagi pembangunan manusia di Provinsi Lampung.

D. Belanja Pemerintah

Belanja pemerintah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dikurangi ekuitas dana, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun. Belanja daerah dibagi menjadi belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja pembangunan diantaranya belanja pemerintah di bidang pendidikan, belanja pemerintah di bidang kesehatan dan belanja pemerintah di bidang fasilitas umum, merupakan belanja pembangunan karena bertujuan sebagai investasi pemerintah.

Sesuai dengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa kesehatan dan pendidikan merupakan hak dasar manusia, sehingga pemerintah harus bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan berupa perlindungan dan fasilitas sarana prasarannya kepada semua masyarakatnya. Tujuan pembangunan nasional menyatakan bahwa setiap penduduk berhak mendapatkan derajat kesehatan dan pendidikan yang setinggi-tingginya. Kesehatan dan pendidikan merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Rendahnya derajat kesehatan dan pendidikan akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah pula. Oleh karena itu, diperlukan anggaran khusus untuk meningkatkan pelayanan dan sarana kesehatan melalui belanja pemerintah. Dalam hal ini belanja pemerintah di bidang fasilitas umum juga tak terlepas dalam rangka menyokong kemudahan bagi masyarakat menjalankan aktivitas masyarakatnya.



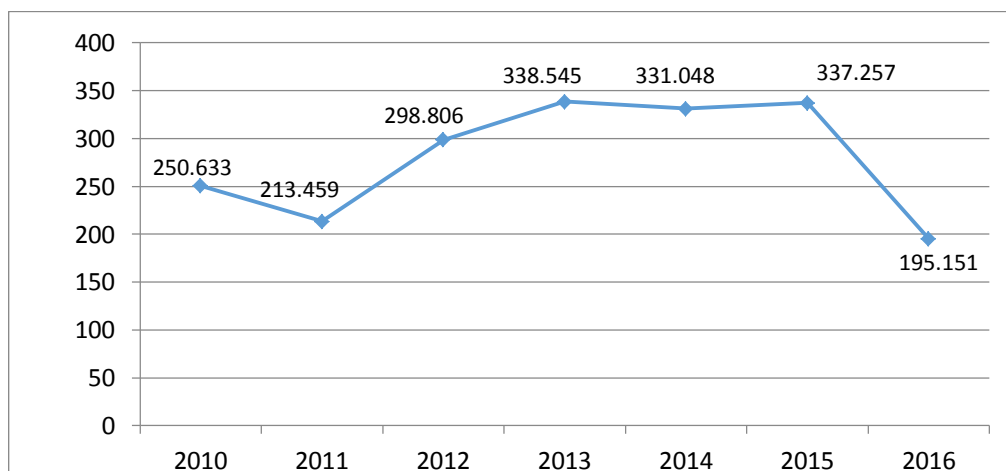
Sumber : Kemenkeu, Tahun 2010-2016

Gambar 4.2

Anggaran Kesehatan dalam Belanja Pemerintah Provinsi Lampung
(juta rupiah)

Grafik 4.2 di atas menunjukkan bahwa anggaran kesehatan dalam belanja pemerintah di Provinsi Lampung pada tahun 2010-2016 terus mengalami peningkatan. Peningkatan anggaran belanja daerah di bidang kesehatan sangat signifikan meningkat pada tahun 2016 yakni Rp.562.391 juta rupiah. Terlihat bagaimana pemerintah sangat memperhatikan mutu kesehatan masyarakat Provinsi Lampung dengan terus meningkatkan alokasi belanja daerah pada bidang kesehatan yang dianggap sangatlah penting dalam meningkatkan sumberdaya manusianya.

Belanja pemerintah memiliki fungsi alokasi, yaitu alokasi untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap sarana dan prasarana pelayanan publik. Selain di bidang kesehatan, belanja pemerintah di bidang pendidikan juga penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

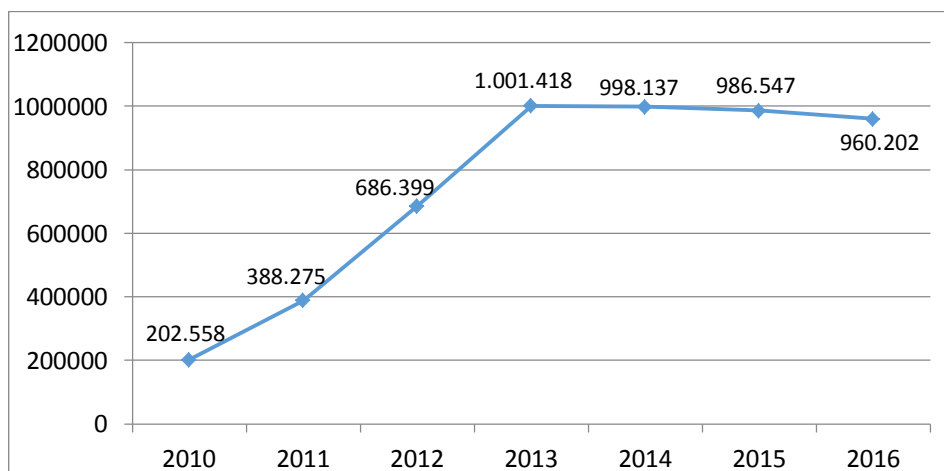


Sumber : Kemenkeu, Tahun 2010-2016

Gambar 4.3

Anggaran Pendidikan dalam Belanja Pemerintah Provinsi Lampung
(juta rupiah)

Grafik 4.3 di atas menunjukkan bahwa anggaran pendidikan dalam total belanja pemerintah di Provinsi Lampung pada tahun 2010-2016 berfluktuasi. Penurunan anggaran belanja pemerintah daerah yang dialokasikan pada bidang kesehatan terjadi pada tahun 2011, yaitu Rp. 213.456 juta rupiah. Anggaran belanja pemerintah daerah di bidang pendidikan semakin menurun ditahun 2016 yaitu, Rp 195.151 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Lampung masih kurang menyadari peran anggaran di bidang pendidikan sangatlah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.



Sumber : Kemenkeu, Tahun 2010-2016

Gambar 4.4

Anggaran Fasilitas Umum dalam Belanja Pemerintah Provinsi Lampung
(juta rupiah)

Grafik 4.4 di atas menunjukkan bahwa anggaran fasilitas umum dalam belanja pemerintah di Provinsi Lampung pada tahun 2010-2013 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan anggaran belanja daerah di bidang kesehatan sangat signifikan meningkat pada tahun 2013 yakni Rp.1.001.418 juta rupiah. Namun pada tahun selanjutnya anggaran di bidang fasilitas umum terus menurun sampai dengan tahun 2016, yakni Rp.960.202. Peranan alokasi dana pada fasilitas umum juga sangatlah penting dalam hal mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.